



Pansus Pelindo II: Pelabuhan Kijing Belum Sampai Target



SALAMAN – Ketua DPR Bambang Soesatyo bersalaman dengan Ketua Pansus Pelindo II Rieke Dyah Pitaloka dalam Rapat Paripurna DPR, di Jakarta, Kamis (25/7).

JAKARTA, SP - Ketua Pansus Pelindo II DPR, Rieke Diah Pitaloka sempat menyinggung pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (25/7). Dia menyebut pembangunan pelabuhan tersebut hingga saat ini belum sampai target yang direncanakan dan terindikasi dilakukan tanpa studi kelayakan yang layak.

Realisasi investasi Pelabuhan Kijing hingga

• **Baca Halaman 7**



Hal 1 | ■ **pansus pelindo**

September 2018, baru 11,4 persen dan telah menghabiskan uang negara Rp269 miliar hanya untuk studi kelayakan, survei investigasi design (SID) dan *Detail Engineering Design* (DED).

“Adapun realisasi fisik pada bulan yang sama hanya mencapai 0,143 persen,” ujarnya.

Pelabuhan Kijing hanya satu dari sekian pelabuhan yang jadi pengawasan Panitia Khusus Hak Angket soal Pelindo II tersebut. Rapat paripurna itu sendiri menyetujui laporan Pansus agar rekomendasi mereka segera dilaksanakan pemerintah.

Salah satu poin penting rekomendasi adalah menyelesaikan kasus pelanggaran ketenagakerjaan dan menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap pekerja PT Jakarta International Container Terminal (PT JICT).

“Mendesak manajemen Pelindo II segera menyelesaikan kasus pelanggaran ketenagakerjaan dan menghentikan segala bentuk kriminalisasi kepada pekerja Pelindo II maupun anak perusahaan Pelindo II,” kata Rieke.

Rieke menjelaskan, pansus tahap kedua melanjutkan penyelidikan mengacu hasil kerja dan rekomendasi pada tahap pertama. Kegi-

atan yang dilakukan antara lain, rapat konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan RDPD dengan pihak terkait serta ahli.

“Pansus juga melakukan 16 kali kunjungan kerja dalam negeri dan dua kali ke mancanegara. Kunjungan kerja dalam negeri dilakukan ke pelabuhan yang pembangunannya direncanakan menggunakan dana global bond yaitu Pelabuhan Tanjung Carat Palembang, Pelabuhan Kijing Kalbar, Pelabuhan Sorong, Papua Barat,” ujarnya.

Menurut Rieke, pembangunan pelabuhan tersebut hingga saat ini belum sampai target yang direncanakan dan terindikasi dilakukan tanpa studi kelayakan yang layak. Selain Pelabuhan Kijing, dia juga menyebut Pelabuhan Tanjung Carat dan Pelabuhan Sorong yang saat ini masih tahap *review* studi kelayakan.

Pansus Pelindo II mendukung presiden berani melakukan terobosan progresif mengembalikan tata kelola BUMN sesuai mandat dan perintah Pasal 33 UUD 1945 khususnya di sektor kepelayuhanan.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, Pansus juga meminta aparat terutama

KPK dan Polri melanjutkan penyidikan dan pelanggaran UU yang mengakibatkan kerugian negara di Pelindo II dan aparat harus menjatuhkan sanksi pidana kepada siapa pun dari di institusi mana pun yang terlibat.

“Terutama segera mengambil keputusan hukum terhadap para pihak yang terbukti bersalah dan dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK maupun Polri atas beberapa kasus hukum yang terjadi di Pelindo II,” katanya.

Pansus tetap pada sikap politik di rekomendasi tahap pertama, yaitu merekomendasikan presiden untuk tidak serta merta membuka investasi asing yang dalam jangka panjang merugikan bangsa secara moral dan materil, yang mengancam keselamatan negara dan kedaulatan ekonomi politik bangsa.

Laporan akhir pansus itu diserahkan langsung kepada pimpinan DPR yang diwakili Bambang Soesatyo, Utut Adianto, dan Agus Hermanto. Pansus memohon pimpinan DPR untuk dapat menyerahkan hasil kerja pansus termasuk audit investigasi BPK kepada presiden, KPK, Polri, Kementerian BUMN, dan Peindo II untuk digunakan sebagaimana mestinya. (ant/bls)